

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan penulis mengenai Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Fisik di Desa Wage, Kabupaten Sidoarjo, sesuai dengan fokus penelitian yakni Harapan (*Expectation*), Norma (*Norm*), Wujud Perilaku (*Performance*), Penilaian (*Evaluation*) dan Sanksi (*Sanction*) maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dimensi Harapan (*Expectation*), yang secara keseluruhan peran BPD Wage telah baik dalam memenuhi harapan masyarakat dalam memastikan keberhasilan program pembangunan desa. BPD mampu menyalurkan aspirasi warga secara partisipatif melalui forum-forum resmi dan jalur komunikasi berjenjang mulai dari tingkat RT hingga desa. Mekanisme umpan balik yang berjalan baik memungkinkan identifikasi masalah secara cepat dan terarah. Selain itu, kewenangan BPD untuk memastikan keberlanjutan program bahkan hingga mengusulkan pemberhentian kepala desa bila terjadi penyimpangan menunjukkan fungsi pengawasan yang tegas dan responsif terhadap harapan publik.
2. Dimensi Norma (*Norm*), yang secara keseluruhan peran BPD Wage diterapkan dengan baik dan konsisten dengan bekerja berdasarkan kerangka regulasi serta prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Komitmen BPD terlihat melalui pembahasan internal rutin, peningkatan kapasitas, dan

kolaborasi aktif dengan pemerintah desa dalam penyampaian laporan secara terbuka. Meski demikian, diperlukan sosialisasi yang lebih luas kepada seluruh unsur masyarakat agar norma-norma kelembagaan yang sudah diterapkan BPD dapat dipahami dan didukung oleh seluruh warga secara merata.

3. Dimensi Wujud Perilaku (*Performance*), yang secara keseluruhan peran BPD Wage telah menunjukkan perilaku organisasi yang cukup baik dan representatif. Fungsi pembahasan, penyerapan aspirasi, dan pengawasan telah berjalan melalui tindak lanjut terhadap masukan warga. Namun masih terdapat kendala internal seperti perbedaan persepsi dan keterbatasan waktu anggota BPD yang memengaruhi efektivitas pengawasan. Dari sisi eksternal, hambatan administratif seperti keterlambatan pencairan anggaran atau perubahan PAK menghambat realisasi aspirasi masyarakat. Meski demikian, pemerintah desa tetap berupaya menyesuaikan pelaksanaan program dengan kondisi anggaran agar seluruh kegiatan dapat terealisasi tepat waktu.
4. Penilaian (*Evaluation*) dan Sanksi (*Sanction*), yang secara keseluruhan peran BPD Wage diterapkan dengan baik, mekanisme evaluasi BPD Wage telah dilakukan secara terstruktur dan berjenjang, baik pada saat pelaksanaan maupun pada akhir program pembangunan. Evaluasi tersebut diikuti dengan tindak korektif yang dilakukan secara terbuka melalui forum diskusi dengan pemerintah desa. BPD juga menerapkan tindakan preventif dengan tidak melakukan pembiaran terhadap potensi penyimpangan, mengingat konsekuensi hukum yang diatur dalam KUHP Pasal 55. Selain itu, publikasi anggaran melalui berbagai media menunjukkan komitmen terhadap

transparansi serta memastikan masyarakat dapat mengawasi pembangunan secara mandiri.

5.2 Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Agar lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) lebih representatif dan juga akan dapat bekerja secara lebih efektif, maka lembaga BPD perlu dirancang sebagai lembaga yang berfungsi penuh waktu dalam menjalankan peran sebagai wakil masyarakat desa. Langkah ini sekaligus menjadi bentuk respons dan persiapan dalam menghadapi berbagai kewenangan serta perencanaan pembangunan yang telah didesentralisasikan kepada pemerintah desa.
2. Dapat dilakukan optimalisasi pembagian tugas internal BPD untuk mengurangi hambatan berupa belum menyeluruhnya anggota yang efektif turun dalam perencanaan maupun pelaksanaan, sehingga dapat dibentuk tim kerja (tim aspirasi, tim pengawasan, dsb).
3. Perlu untuk meningkatkan pemanfaatan anggaran desa yang dapat diakses dengan mudah serta lebih luas dan transparan sehingga tidak hanya melalui spanduk dan media fisik, tetapi juga melalui media digital khusus desa agar berjalan lebih optimal.